

RENJA

20 26

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 23 Temanggung Kode Pos 56213
Telepon (0293) 493481 Faximili (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

VERIFIKASI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator Pada
tanggal : 31 Juli 2025

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan
Pemerintahan,



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator,



DWI LESTARI, ST.
NIP. 19940916 202202 2 001

Mengetahui,

KEPALA BAPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda (W/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan Kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Renja merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disertai dengan penetapan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, program dan kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini masih banyak dijumpai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Sekretariat DPRD ini, terutama apabila dilakukan review atas Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam Upaya mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 31 Juli 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si

Rebina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum 10

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)..... 35

2.2.2 Data Pokok 39

2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD 52

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 54

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 59

2.6 Inovasi Perangkat Daerah 60

2.7 Penghargaan 60

BAB III Tujuan , Sasaran , Program , Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 61

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD 61

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

4.1 Program dan Kegiatan 64

BAB V Penutup 75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

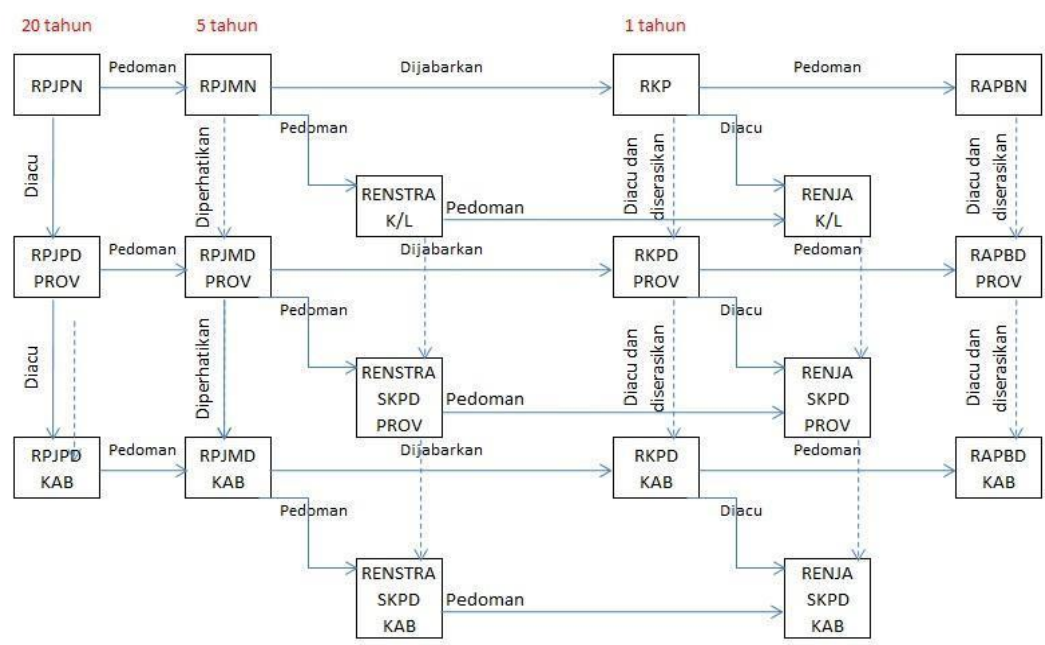
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat DPRD untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2026, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2026;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat DPRD

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat DPRD

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat DPRD
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi (Sekretariat DPRD) dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD);

Penyusunan dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja (Sekretariat DPRD);

Penyempurnaan rancangan Renja (Sekretariat DPRD) perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja (Sekretariat DPRD) dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja (Sekretariat DPRD) yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja (Sekretariat DPRD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) (Sekretariat DPRD) Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja (Sekretariat DPRD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (Sekretariat DPRD)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029**

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2026 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun kesatu pelaksanaan Renstra (Sekretariat DPRD 2025-2029) telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
Tahun 2024

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|--|---|------------|--------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Sekretariat DPRD | | | | | | 53.381.762.875,00 | Rp53.495.825.817,00 | | | | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 53.381.762.875,00 | Rp53.495.825.817,00 | | | | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 53.381.762.875,00 | Rp53.495.825.817,00 | | | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum ,dan jasa penunjang perangkat daerah | | | | | 32.000.881.724,00 | Rp31.391.732.066,00 | | 29.564.568.484 | | 94,2 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|---|------------|--------------------------------|----|-------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.579.999.110,0 0 | Rp2.459.329. 452,00 | | 2.372.636.174 | | 96,5 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 2.579.999.110,0 0 | Rp2.459.329. 452,00 | | 2.372.636.174 | | 96,5 |
| | Administrasi umum Perangkat daerah | | | | | | 638.446.500,00 | Rp663.316.50 0,00 | | 555.678.540 | | 83,8 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 10.000.000,00 | Rp13.000.000, 00 | | 11.840.500 | | 91,1 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 30.933.500,00 | Rp30.933.500, 00 | | 17.686.200 | | 57,2 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|--|------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | | 22.550.000,00 | Rp22.550.000,00 | | 21.887.900 | | 97,1 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan | | | | | 15.000.000,00 | Rp36.870.000,00 | | 31.539.000 | | 85,5 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | 110.000.000,00 | Rp110.000.000,00 | | 93.373.000 | | 84,9 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 449.963.000,00 | Rp449.963.000,00 | | 379.351.940 | | 84,3 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 0,00 | | | | | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan | | | | | | | | | | |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|--|------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | mesin lainnya yang disediakan | | | | | | | | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 807.933.494,00 | Rp835.808.49 4,00 | | 743.274.210 | | 88,9 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 8.760.000,00 | Rp9.985.000,0 0 | | 7.426.500 | | 74,4 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 110.000.000,00 | Rp125.000.00 0,00 | | 102.151.179 | | 81,7 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | | | | | 689.173.494,00 | Rp700.823.49 4,00 | | 633.696.531 | | 90,4 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|--|--|------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 988.785.740,00 | Rp939.060.740,00 | | 672.658.838 | | 71,6 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 753.785.740,00 | Rp676.545.740,00 | | 466.526.738 | | 68,9 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | | | | 85.000.000,00 | Rp91.700.000,00 | | 73.939.600 | | 80,6 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | 125.000.000,00 | Rp130.915.000,00 | | 100.421.000 | | 76,7 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|---|------------|--------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | 25.000.000,00 | Rp39.900.000,00 | | 100.421.000 | | 251,6 |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 26.013.948.380,00 | Rp25.522.448.380,00 | | 24.392.468.722 | | 95,6 |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD | | | | | 25.332.948.480,00 | Rp24.867.948.480,00 | | 23.894.470.309 | | 96,1 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | | | | | 590.999.900,00 | Rp564.499.900,00 | | 466.110.000 | | 82,6 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | | 90.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | | 31.888.413 | | 35,4 |
| | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | 971.768.500,00 | Rp971.768.500,00 | | 827.852.000 | | 85,2 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|---|------------|--------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | 100.068.500,00 | Rp100.068.500,00 | | 65.941.000 | | 65,9 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan | | | | | 282.000.000,00 | Rp282.000.000,00 | | 235.000.000 | | 83,3 |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan DPRD yang di publikasikan Persentase kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana | | | | | 21.380.881.151,00 | Rp22.104.093.751,00 | | 12.987.495.282 | | 58,7 |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun | | | | | 4.243.781.300,00 | Rp4.605.631.300,00 | | 2.786.402.712 | | 60,5 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|--|---|------------|--------------------------------|----|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | 2.250.298.800,00 | Rp2.492.148.800,00 | | 1.560.737.900 | | 62,6 |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan | Jumlah Dokumen kajian Perundang -Undangan | | | | | 505.302.500,00 | Rp625.302.500,00 | | 209.968.000 | | 33,6 |
| | Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi | | | | | 1.488.180.000,00 | Rp1.488.180.000,00 | | 1.015.696.812 | | 68,2 |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah dokumen anggaran | | | | | 799.030.000,00 | Rp709.030.000,00 | | 430.839.000 | | 60,8 |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | 261.687.000,00 | Rp261.687.000,00 | | 164.560.000 | | 62,9 |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan | | | | | 261.691.000,00 | Rp171.691.000,00 | | 86.504.000 | | 50,4 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|---|--|------------|--------------------------------|----|-------------|----------------|----------------------|----------------|------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Perubahan KUA dan | | | | | | | | | | |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | | 137.826.000,00 | Rp137.826.00 0,00 | | 87.410.000 | | 63,4 |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | | 137.826.000,00 | Rp137.826.00 0,00 | | 92.365.000 | | 67,1 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | | | | | 184.000.000,00 | Rp184.000.00 0,00 | | 10.800.000 | | 5,87 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | 44.000.000,00 | Rp44.000.000, 00 | | 3.400.000 | | 7,72 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | | | 44.000.000,00 | Rp44.000.000, 00 | | 1.800.000 | | 4,1 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|--|---|------------|--------------------------------|----|-------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | 44.000.000,00 | Rp44.000.000,00 | | 3.300.000 | | 7,5 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | 52.000.000,00 | Rp52.000.000,00 | | 2.300.000 | | 4,42 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 3.651.090.851,00 | Rp3.699.520.851,00 | | 2.776.492.529 | | 75,1 |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | | 2.827.544.500,00 | Rp2.827.544.500,00 | | 2.019.048.454 | | 71,4 |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | | 222.171.700,00 | Rp222.171.700,00 | | 219.215.432 | | 98,7 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATUA N | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2024 | | | REALISASI 2024 | | CAPAIAN SD 2024 | |
|--------|--|---|------------|--------------------------------|----|-------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renja) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | 166.337.151,00 | Rp214.767.151,00 | | 200.145.143 | | 93,2 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Aspirasi yang dapat ditindak lanjuti | | | | | 1.597.211.000,00 | Rp1.214.211.000,00 | | 1.085.356.000 | | 89,4 |
| | Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun | | | | | 125.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | | 69.964.500 | | 55,9 |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | | 1.472.211.000,00 | Rp1.089.211.000,00 | | 1.015.391.500 | | 93,2 |
| | Fasilitas Tugas DPRD | Persentase anggota DPRD yang difasilitasi | | | | | 10.905.768.000,00 | Rp11.691.700.600,00 | | 5.897.605.041 | | 50,4 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | 10.905.768.000,00 | Rp11.691.700.600,00 | | 5.897.605.041 | | 50,4 |

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD
s.d Triwulan II Tahun 2025

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Sekretariat DPRD | | | | | | 51.202.595. 629,00 | 48.962.662. 482,00 | | 18.788.529. 008,00 | | 18.788.52 9.008,00 | | 38,4 |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 51.202.595. 629,00 | 48.962.662. 482,00 | | 18.788.529. 008,00 | | 18.788.52 9.008,00 | | 38,4 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 51.202.595. 629,00 | 48.962.662. 482,00 | | 18.788.529. 008,00 | | 18.788.52 9.008,00 | | 38,4 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah | | | | | 31.521.979. 724,00 | 35.398.636. 174,00 | | 15.360.214. 611,00 | | 15.360.21 4.611,00 | | 43,4 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 2.579.999.1 10,00 | 2.579.999.1 10,00 | | 1.248.893.6 23,00 | | 1.248.893. 623,00 | | 48,4 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | 2.579.999.10,00 | 2.888.934.123,00 | | 1.248.893.623,00 | | 1.248.893.623,00 | | 43,4 |
| | Administrasi umum Perangkat daerah | | | | | | 640.115.300,00 | 614.380.300,00 | | 135.783.797,00 | | 135.783.797,00 | | 22,2 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 2.408.000,00 | | 2.408.000,00 | | 34,4 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 27.602.300,00 | 21.722.270,00 | | 3.680.000,00 | | 3.680.000,00 | | 16,9 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|---|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | | | | | 22.550.000, 00 | 13.530.000, 00 | | 2.675.000,0 0 | | 2.675.000, 00 | | 19,8 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan | | | | | 20.000.000, 00 | 20.000.000, 00 | | 7.950.000,0 0 | | 7.950.000, 00 | | 39,8 |
| | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 110.000.000 ,00 | 75.838.500, 00 | | 42.781.000, 00 | | 42.781.00 0,00 | | 56,4 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 449.963.000 ,00 | 224.987.300 ,00 | | 76.289.797, 00 | | 76.289.79 7,00 | | 33,4 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 100.000.000 ,00 | 185.735.000 ,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | | | | | 50.000.000,00 | 74.083.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | 50.000.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 910.888.694,00 | 888.088.694,00 | | 409.373.619,00 | | 409.373.619,00 | | 46,09 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 8.760.000,00 | 7.080.000,00 | | 3.524.900,00 | | 3.524.900,00 | | 49,8 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | | 45.965.690,00 | | 45.965.690,00 | | 41,8 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 792.128.694 ,00 | 749.137.797 ,00 | | 359.883.029 ,00 | | 359.883.0 29,00 | | 48,03 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 894.959.740 ,00 | 834.959.740 ,00 | | 161.879.729 ,00 | | 161.879.7 29,00 | | 19,4 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 659.959.740 ,00 | 550.735.766 ,00 | | 135.126.399 ,00 | | 135.126.3 99,00 | | 24,5 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | | | | 85.000.000, 00 | 83.474.300, 00 | | 4.682.000,0 0 | | 4.682.000, 00 | | 5,60 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi | | | | | 125.000.000 ,00 | 93.096.400, 00 | | 21.791.330, 00 | | 21.791.33 0,00 | | 23,4 |
| | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab ilitasi | | | | | 25.000.000, 00 | 24.952.007, 00 | | 280.000,00 | | 280.000,0 0 | | 1,12 |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | | 26.013.948. 380,00 | 30.096.301. 211,00 | | 13.244.516. 843,00 | | 13.244.51 6.843,00 | | 44,1 |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD | | | | | 25.332.948. 480,00 | 29.415.301. 311,00 | | 13.227.802. 843,00 | | 13.227.80 2.843,00 | | 44,5 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | | | | | 590.999.900,00 | 581.762.900,00 | | 16.714.000,00 | | 16.714.000,00 | | 2,87 |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | | 90.000.000,00 | 85.700.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Layanan Administrasi DPRD | | | | | | 382.068.500,00 | 382.068.500,00 | | 159.767.000,00 | | 159.767.000,00 | | 41,8 |
| | Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | 100.068.500,00 | 89.300.000,00 | | 18.767.000,00 | | 18.767.000,00 | | 21,2 |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan | | | | | 282.000.000,00 | 282.000.000,00 | | 141.000.000,00 | | 141.000.000,00 | | 50 |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN | Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas Persentase kegiatan DPRD | | | | | 19.680.615.905,00 | 13.564.026.308,00 | | 3.428.314.397,00 | | 3.428.314.397,00 | | 25,3 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|---|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | TUGAS DAN FUNGSI DPRD | yang di publikasikan Persentase kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana | | | | | | | | | | | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun | | | | | 3.640.702.5 30,00 | 6.272.330.5 00,00 | | 281.950.000 ,00 | | 281.950.0 00,00 | | 4,45 |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | 2.139.206.6 30,00 | 1.271.353.1 32,00 | | 281.950.000 ,00 | | 281.950.0 00,00 | | 22,2 |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan | Jumlah Dokumen kajian Perundang -Undangan | | | | | 505.302.500 ,00 | 1.835.174.3 00,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Fasilitas Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi | | | | | 996.193.400 ,00 | 755.529.600 ,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|---|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah dokumen anggaran | | | | | 638.982.000 ,00 | 799.030.000 ,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | 206.505.000 ,00 | 151.517.800 ,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | 206.505.000 ,00 | 156.239.800 ,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | | 112.986.000 ,00 | 81.927.500, 00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | | 112.986.000 ,00 | 82.097.500, 00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0 |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan | | | | | 184.000.000 ,00 | 184.000.000 ,00 | | 15.200.000, 00 | | 15.200.00 0,00 | | 8,26 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|---|--|------------|-----------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | 44.000.000, 00 | 22.000.000, 00 | | 2.600.000,0 0 | | 2.600.000, 00 | | 11,8 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | 44.000.000, 00 | 22.000.000, 00 | | 5.000.000,0 0 | | 5.000.000, 00 | | 22,7 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | 44.000.000, 00 | 22.000.000, 00 | | 4.800.000,0 0 | | 4.800.000, 00 | | 21,8 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Hasil Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | 52.000.000, 00 | 26.000.000, 00 | | 2.800.000,0 0 | | 2.800.000, 00 | | 10,8 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 3.338.000.0 00,00 | 3.363.938.7 51,00 | | 1.041.918.8 97,00 | | 1.041.918. 897,00 | | 30,9 |
| | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | | 2.927.000.0 00,00 | 2.201.606.8 00,00 | | 875.782.000 ,00 | | 875.782.0 00,00 | | 39,8 |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | | 225.000.000 ,00 | 222.171.600 ,00 | | 109.613.000 ,00 | | 109.613.0 00,00 | | 49,3 |
| | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | 186.000.000 ,00 | 164.258.326 ,00 | | 56.523.897, 00 | | 56.523.89 7,00 | | 34,4 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Aspirasi yang dapat ditindak lanjuti | | | | | 1.685.225.7 00,00 | 1.685.225.7 00,00 | | 562.223.500 ,00 | | 562.223.5 00,00 | | 33,4 |
| | Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun | | | | | 125.000.000 ,00 | 85.164.800, 00 | | 15.950.000, 00 | | 15.950.00 0,00 | | 18,7 |

| N O | BIDANG/PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | SATU AN | TARGET AKHIR RENSTRA (2026) | | TARGET 2025 | | | REALISASI SD TRIWULAN II 2025 | | REALISASI 2025 | | CAPAIAN SD 2025 | |
|--------|--|---|------------|-----------------------------------|----|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | | K | Rp | K | Rp(Renj a) | Rp(DPA) | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | | 1.560.225.700,00 | 1.388.409.850,00 | | 546.273.500,00 | | 546.273.500,00 | | 39,3 |
| | Fasilitas Tugas DPRD | Persentase anggota DPRD yang difasilitasi | | | | | 10.193.705.675,00 | 10.153.150.600,00 | | 1.527.022.000,00 | | 1.527.022.000,00 | | 15,1 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | 10.193.705.675,00 | 5.076.575.300,00 | | 18.788.529.008,00 | | 18.788.529.008,00 | | 370,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2025 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD berupa:

1. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah.
 - b. Persentase Jumlah Rancangan, Peraturan Daerah yang dibahas,
 - c. Persentase kegiatan DPRD yang di publikasikan,
 - d. Persentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana.
2. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - j. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
 - k. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - l. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
 - m. Pelaksanaan Reses

3. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
 - c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
 - d. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
 - e. Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
 - f. Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD
 - g. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
5. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi.
 - f. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 - g. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Sangat Tinggi** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas
Capaian Kinerja : 100,00 %
- 2. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi
- 3. Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasikan
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi
- 4. Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Sangat Tinggi

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2026 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD Triwulan II Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**
Kabupaten Temanggung

| No | Indikator Kinerja | Satuan | kondisi akhir 2023 | Target Kinerja | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian s.d tw II 2025 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | | | | |
|----|---|--------|--------------------|----------------|------|------|-------------------|-------|------|------------------------|-------------------------------|----|---|--------|--------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | | | ST | T | SEDANG | RENDAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | % | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 22,11 | | 22,11 | | | | | V |
| 2 | Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas | % | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 9,10 | | 9,10 | | | | | V |
| 3 | Persentase kegiatan Pokok-Pokok DPRD dilaksanakan sesuai rencana | % | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | | 100 | V | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Satuan | kondisi akhir 2023 | Target Kinerja | | | Realisasi Kinerja | | | Capaian s.d tw II 2025 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | | | | |
|----|--|--------|--------------------|----------------|------|------|-------------------|-------|------|------------------------|-------------------------------|---|--------|--------|---------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | | ST | T | SEDANG | RENDAH | SANGAT RENDAH |
| 4 | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan | % | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38,00 | | 38,00 | | | | | V |
| 5 | Presentase kegiatan peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | % | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 50,00 | | 50,00 | | | | | V |

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada satu terdiri dari:
 - a. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah terintegrasi dengan SIPD
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi dengan PD Pengampu terkait
2. Capaian indikator dengan status tercapai ada satu terdiri dari:
 - a. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah terintegrasi dengan SIPD
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan komunikasi dengan PD Pengampu terkait.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada empat terdiri dari:
 - a. Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan Agenda Kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029 dan adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat Kelengkapan Dewan
 - b. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas.

- 1). Faktor Pendorong Indikator Tersebut Adalah adanya Inisiatif dari PD untuk mengusulkan Raperda pada tahun sebelumnya, dengan ditetapkan Propem Perda (Program Pembentukan Perda Tahun 2023)
 - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah harmonisasi yang membutuhkan Proses waktu
 - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indikator tersebut Adalah koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, Bagian Hukum Pemda Kab. Temanggung Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi.
- c. Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan
- 1). Faktor Pendorong Indikator Tersebut Adalah Kemudahan Teknologi dan informasi dalam mempublikasikan kegiatan DPRD
 - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah kebijakan yang mengatur bahwaterdapat beberapa kegiatan dewan tidak boleh dipublikasikan
 - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indicator tersebut Adalah menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD
- d. Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD
- 1). Faktor Pendorong Indikator tersebut Adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus dilaksanakan tepat waktu
 - 2). Faktor Penghambat Indikator tersebut Adalah adanya Proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029
 - 3). Rekomendasi Tindak Lanjut indicator tersebut Adalah koordinasi dan Kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Sekretariat DPRD dengan rincian sebagai berikut

1. Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat didefinisikan sebagai ukuran seberapa besar peningkatan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang dihitung dalam bentuk persentase.

Peningkatan dukungan ini dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti :

1. Peningkatan kualitas layanan : Peningkatan kualitas layanan

Yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Peningkatan Efisiensi : Peningkatan efisiensi dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD

3. Peningkatan Efektifitas : Peningkatan efektifitas dalam mencapai tujuan dan sasaran DPRD yang didukung oleh Sekretariat DPRD.

4. Peningkatan Kepuasan : Peningkatan Kepuasan anggota DPRD terhadap dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Dengan mengukur persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dapat diketahui seberapa besar dampak dari upaya peningkatan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD dan area – area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dukungan.

Rumus=
$$\frac{\text{Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD}} \times 100$$

Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD

TABEL 2.4
Persentase Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Tahun 2020 – 2025

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi | na | na | na | na | na | 221 |

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 | Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD | na | na | na | na | na | 321 |
| | Total Capaian | na | na | na | na | na | 86,06 |

Sumber: Setwan, 2025

Dilihat dari tabel 2.0 menunjukkan bahwa capaian Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD yang terfasilitasi terhadap Jumlah Rencana Kerja Tahunan DPRD adalah 86,06%.

Adapun yang menjadi faktor pendorong adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Banmus dilaksanakan tepat waktu.

Faktor Penghambat nya adalah adanya kendala teknis internal pemerintah Kabupaten Temanggung juga adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan.

Upaya pencapaiannya adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Berikut Data Dukung Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

TABEL 2.5
Data dukung Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Tahun 2025

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

| No | ALAT KELENGKAPAN | KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN |
|----|------------------------------------|---|-----------------|
| A. | Pimpinan DPRD | 1. Perumusan Kebijakan | 12 bulan |
| | | 2. Rapat Pimpinan | 12 bulan |
| | | 3. Koordinasi, Konsultasi, dan Kunjungan Kerja | 12 bulan |
| | | 4. Menindaklanjuti Aduan Masyarakat | 12 bulan |
| B. | Badan Musyawarah | 1. Penyusunan Draft Rencana Kerja | 2 Kegiatan |
| | | 2. Penyusunan Agenda Kegiatan | 12 Kegiatan |
| | | 3. Penetapan Jadwal Kegiatan | 12 Kegiatan |
| | | 4. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa | 3 kegiatan |
| | | 5. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa | 1 Kegiatan |
| C. | Komisi-Komisi | 1. Rapat Internal Komisi | 12 kegiatan |
| | | 2. Rapat Kerja Komisi dengan Perangkat Daerah | 50 kegiatan |
| | | 3. Kunjungan Kerja Dalam Daerah Kabupaten | 40 Kegiatan |
| | | 4. Kunjungan Kerja dalam Provinsi Menginap | 8 Kegiatan |
| | | 5. Kunjungan Kerja dalam Provinsi Tidak Menginap | 2 Kegiatan |
| | | 6. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa | 6 Kegiatan |
| | | 7. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa | 1 Kegiatan |
| | | 8. Bimbingan Teknis | 6 Kegiatan |
| | | 9. Reses | 3 Kegiatan |
| D. | Badan Pembentukan Peraturan Daerah | 1. Penyusunan Propemperda | 2 Kegiatan |
| | | 2. Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Akademik | 10 Kegiatan |
| | | 3. Rapat Bapemperda | 4 Kegiatan |
| | | 4. Rapat Kerja dengan Perangkat Daerah | 4 Kegiatan |
| | | 5. Rapat Kajian Raperda dan Perda | 8 Kegiatan |
| | | 6. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa | 3 Kegiatan |

| No | ALAT KELENGKAPAN | KEGIATAN | VOLUME KEGIATAN |
|----|------------------|--|-----------------|
| | | 7. Kunjungan Kerja keluar Provinsi Luar Pulau Jawa | 1 Kegiatan |
| E. | Badan Anggaran | 1. Membahas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024 | 1 Kegiatan |
| | | 2. Membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | 1 Kegiatan |
| | | 3. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | 1 Kegiatan |
| | | 4. Membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 1 Kegiatan |
| | | 5. Membahas Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 1 Kegiatan |
| | | 6. Membahas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 1 Kegiatan |
| | | 7. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | 1 Kegiatan |
| | | 8. Membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | 1 Kegiatan |
| | | 9. Membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | 1 Kegiatan |
| | | 10. Membahas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | 1 Kegiatan |
| | | 11. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 | 1 Kegiatan |
| | | 12. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam Pulau Jawa | 3 Kegiatan |
| | | 13. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Luar Pulau Jawa | 1 Kegiatan |
| F. | Badan Kehormatan | 1. Rapat Internal Badan Kehormatan | 8 Kegiatan |
| | | 2. Evaluasi Kinerja Anggota DPRD | 4 Kegiatan |
| | | 3. Kunjungan Kerja Keluar Provinsi Dalam | 3 Kegiatan |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

2. Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persentase RAPERDA dihitung dengan rumus : jumlah RAPERDA yang dibahas dibagi jumlah RAPERDA yang diterima dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.6

Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2020 s/d 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2025

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jumlah RAPERDA yang dibahas | 19 | 16 | 16 | 19 | 6 | 7 |
| 2. | Jumlah RAPERDA yang diterima | 21 | 20 | 18 | 19 | 6 | 7 |

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | % RAPERDA yang disahkan tepat waktu | 90,48 | 80,00 | 88,89 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar 100%.

Faktor Pendorong terkait Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu adalah adanya inisiatif dari Perangkat Daerah untuk mengusulkan Raperda pada tahun sebelumnya dengan ditetapkan Propem Perda (Program Pembentukan Perda) Tahun 2025.

Faktor Penghambat nya adalah harmonisasi yang membutuhkan Proses waktu.

Upaya Pencapaian Target Kinerja adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah terkait, bagian hukum Pemda Kab. Temanggung, Biro Hukum Provinsi terkait harmonisasi.

TABEL 2.7

RAPERDA yang disahkan sampai dengan Triwulan III tahun 2025

| No. | Nama Raperda |
|-----|---|
| 1. | Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat |
| 2. | Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan |
| 3. | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029 |
| 4. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| 5. | Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal |
| 6. | Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 |
| 7. | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

1. Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Prosentase kegiatan pokok pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana mencapai 100%, menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan aspirasi Masyarakat. Kegiatan ini meliputi penyusunan Peraturan Daerah, pengawasan kebijakan pemerintah, dan peningkatan partisipasi Masyarakat. Dengan capaian ini DPRD terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan public dan Pembangunan Daerah.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah pikir DPRD yang terakomodir dalam dokumen pemerintah dibagi jumlah usulan kegiatan pikir DPRD dikali 100%.

Realisasi persentase jumlah pikir DPRD terhadap jumlah raperda dari tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.8
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda
Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jumlah pikir – pikir DPRD yang terakomodir dalam dokumen perencanaan | 978 | 893 | 1331 | 1332 | 1025 | 1613 |
| 2. | Jumlah usulan kegiatan pikir DPRD | 978 | 893 | 1331 | 1332 | 1025 | 1613 |
| | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan III tahun 2025, jumlah pikir – pikir DPRD yang terakomodir dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan sudah 100 %.

Adapun Faktor Pendorong nya Adalah sudah terintegrasi dengan SIPD.

Faktor Penghambat nya Adalah Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu.

Upaya Pencapaian Target Kinerja Adalah koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah Pengampu Terkait.

Berikut kami lampirkan Data Dukung sesuai tabel berikut :

TABEL 2.9
Daftar Kegiatan Pokir 2025 Per Fraksi DPRD

| No. | Fraksi | Tahun 2025 | |
|-----|-----------|---|-----------------------------------|
| | | Jumlah pikir pikir yang terakomodir dalam dokumen perencanaan | Jumlah usulan kegiatan pikir DPRD |
| 1. | PDIP | 465 | 465 |
| 2. | PKB | 228 | 228 |
| 3. | GOLKAR | 194 | 194 |
| 4. | GERINDRA | 123 | 123 |
| 5. | PKS | 129 | 129 |
| 6. | P3 + PAN | 314 | 314 |
| 7. | NUSANTARA | 160 | 160 |
| | JUMLAH | 1.613 | 1.613 |

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2025

2. Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD yang seharusnya dipublikasikan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3.0

Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2020 s/d 2025(sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan | 373 | 304 | 357 | 250 | 335 | 235 |
| | - Rapat Paripurna | 30 | 26 | 26 | 30 | 33 | 15 |
| | - Rapat Komisi | 35 | 44 | 60 | 45 | 46 | 42 |
| | - Rapat Pansus | 44 | 35 | 53 | 37 | 37 | 26 |
| | - Rapat Badan Kehormatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | - Rapat Badan Anggaran | 15 | 9 | 12 | 10 | 10 | 6 |
| | - Rapat Badan Musyawarah | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 10 |
| | - Rapat Badan Pembentukan Perda | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| | - Kunjungan kerja DPRD dalam daerah | 144 | 44 | 60 | 40 | 50 | 40 |
| | - Penyerapan aspirasi/reses | 90 | 135 | 135 | 81 | 134 | 90 |
| 2. | Jumlah kegiatan DPRD yang seharusnya dipublikasikan | 473 | 370 | 405 | 250 | 335 | 235 |
| | - Rapat Paripurna | 30 | 26 | 26 | 22 | 33 | 15 |
| | - Rapat Komisi | 66 | 76 | 79 | 45 | 46 | 42 |
| | - Rapat Pansus | 57 | 44 | 60 | 35 | 37 | 26 |
| | - Rapat Badan Kehormatan | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| | - Rapat Badan Anggaran | 19 | 12 | 14 | 8 | 10 | 6 |
| | - Rapat Badan Musyawarah | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 |
| | - Rapat Badan Pembentukan Perda | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| | - Kunjungan kerja DPRD dalam daerah | 193 | 62 | 72 | 55 | 50 | 40 |
| | - Penyerapan aspirasi/reses | 90 | 135 | 135 | 76 | 134 | 90 |
| 3. | % Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | 78,86 | 82,16 | 88,14 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) adalah sebesar 100 %.

Faktor Pendukungnya adalah kemudahan teknologi dan informasi dalam mempublikasikan kegiatan DPRD.

Faktor Penghambatnya adalah Kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan yang tidak boleh di publikasikan.

Upaya Pencapaian Target adalah menjaga intensitas dan kualitas kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.1

Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

| No. | Media Publikasi | Jumlah Publikasi | | | | | |
|-----|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Majalah/Buletin | 94 | 60 | 55 | 33 | 20 | - |
| 2. | Kalender | 75 | 75 | 70 | 50 | - | - |
| 3. | Instagram | - | - | - | - | 131 | 117 |
| 4. | Koran | 37 | 36 | 36 | 23 | 84 | - |
| 5. | Temanggung TV | 55 | 40 | 45 | 8 | 8 | - |
| 6. | Media online | 112 | 93 | 151 | 136 | 92 | 118 |
| | jumlah | 373 | 304 | 357 | 250 | 335 | 235 |

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2025

3. Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang direncanakan
- Kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam proses legislasi, pengawasan dan representasi.
- Kegiatan ini dapat meliputi :
- Pelatihan dan workshop : Pelatihan dan workshop yang dirancang untuk meniingkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota DPRD dalam bidang tertentu, seperti legislasi, pengawasan, dan komunikasi.
 - Studi banding kedaerah lain atau lembaga lain untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang praktik terbaik dalam pemerintahan dan legislasi.

- Rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan ahli, untuk memperoleh informasi dan perspektif yang beragam.

Sehingga tujuan kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD adalah untuk meningkatkan kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD, serta meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam mewakili kepentingan masyarakat.

Rumus kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD (6Kegiatan) dibagi kegiatan peningkatan anggota DPRD yang diterima (6kegiatan) dikali 100.

TABEL 3.1

Daftar Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD Tahun 2020 s/d 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD yang diterima | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |

Sumber : Setwan 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD pada tahun 2020 - 2025 (sampai dengan Triwulan III tahun 2025) adalah sebesar 100 %.

Faktor Pendorongnya adalah Penyusunan Rencana Kerja DPRD yang tepat dan penyusunan agenda kegiatan setiap bulan melalui Rapat Bamus yang dilaksanakan tepat waktu.

Adapun Faktor Penghambat adalah Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029.

Upaya Pencapaian Target Kinerja adalah Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan Dewan.

Berikut kami lampirkan Data Dukung sebagai berikut :

TABEL 3.2

Daftar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 2025

| No. | Kegiatan | Tahun 2025 | |
|-----|---|---|---|
| | | Jumlah Peningkatan Kapasitas yang terakomodir | Jumlah Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang diterima |
| 1. | Tugas Pokok dan Fungsi alat – alat Kelengkapan DPRD Semarang, 26-28 Februari 2025 | 1 | 1 |
| 2. | Optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD Kab. Tmg Jakarta, 19 – 23 Mei 2025 | 1 | 1 |
| 3. | Penerapan Standart harga satuan nasional berdasarkan Perpres no 72 Tahun 2025 , Semarang 22 – 24 September 2025 | 1 | 1 |
| 4. | Pendalaman Tugas anggota DPRD Kab. Temanggung oleh BPSDMD Propinsi Jawa Tengah | 1 | 1 |
| 5. | Bintek Partai | 1 | 1 |
| 6. | Bintek Partai | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 6 | 6 |

Sumber : Setwan 2025

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat DPRD dari 5 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Hal ini disebabkan karena adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024 – 2029 dan juga adanya beberapa agenda kegiatan yang bersamaan.
 - Indikator persentase jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas.
Hal ini disebabkan karena harmonisasi yang membutuhkan proses waktu.
 - Presentase Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai Rencana.
Hal ini disebabkan karena Proses administrasi dan verifikasi yang membutuhkan waktu.
 - Presentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.
Hal ini disebabkan karena Adanya proses peralihan anggota DPRD periode 2024-2029.
 - Presentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan.
Hal ini disebabkan karena Kebijakan yang mengatur bahwa terdapat beberapa kegiatan dewan tidak boleh dipublikasikan .
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, antara lain :
 - Keterbatasan sumber daya seperti staf dan fasilitas yang dapat menghambat kinerja sekretariat DPRD.
 - Koordinasi yang kurang efektif antara sekretariat DPRD dengan anggota DPRD dan Pemerintah daerah
3. Optimalisasi Sumber Daya dan Koordinasi untuk Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu anggaran di beberapa program dan kegiatan di Sekretariat DPRD untuk memenuhi kebutuhan belanja.
2. Penambahan pagu anggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan belanja dan merupakan hasil usulan koreksi dari rancangan awal RKPD Tahun 2026.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 3.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

| RANCANGAN AWAL RKPD 2026 | | | | | | | HASIL PENETAPAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|--------|----------------|-----------------|---|--------|--|-------------------|---------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | 51.864.660.505 | 1 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | 52.001.926.284,00 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 51.864.660.505 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | 52.001.926.284,00 | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | 51.864.660.505 | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | 52.001.926.284,00 | |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 35.004.303.842 | A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| 1 | [Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] | Kab. Temanggun g | Persentas e ketersedia an administr asi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah | 100 | % | 35.004.303.842 | 1. | [Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] | | | 5 | dokumen | 35.141.569.621,00 | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Temanggun g | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 20 Org/bln | - | 2.579.999.110 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | 2.579.999.110,00 | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Temanggun g | | | | 545.130.500 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 545.130.500,00 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2026 | | | | | | | HASIL PENETAPAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--------|----------------|-----------------|---|--------|--|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Temanggun g | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 2 Unit | 25.000.000 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 25.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Temanggun g | | | | 790.150.421 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 831.336.400,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 676.722.500 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 676.722.500,00 | |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 30.005.301.311 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | | 29.963.381.111,00 | |
| | Layanan Administrasi DPRD | | | | | 382.000.000 | | Layanan Administrasi DPRD | | | | | 520.000.000,00 | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 16.860.356.663 | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | | | | | 16.860.356.663,00 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2026 | | | | | | | HASIL PENETAPAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|--|-------------------|--------|----------------|-----------------|---|--------|--|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | [Meningka tnya kualitas persidang an dan kajian peraturan perundang- undangan] | Kab. Temanggun g | Pe rse nta se ju ml ah ra nc an ga n Pe rat ur an Da era h ya ng dib ah as Persentas e kegiatan DPRD yang dipublika sikan Pers enta se kegi atan peni ngk atan kap | 100 | % | 16.860.356.663 | | [Meningka tnya kualitas persidan gan dan kajian peraturan perundang- undangan] | | | | | 16.860.356.663,00 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2026 | | | | | | | HASIL PENETAPAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|--------|----------------|-----------------|--|--------|--|-------------------|--------|------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | asit as ang gota DPR D Persentas e kegiatan Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Dilaksanak an Sesuai Rencana | | | | | | | | | | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Kab. Temanggun g | | | | 3.491.135.000 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | | 3.491.135.000,00 | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 799.026.000 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | 799.026.000,00 | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | 90.000.000 | | Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan | | | | | 90.000.000,00 | |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2026 | | | | | | | HASIL PENETAPAN | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--|-------------------|--------|----------------|-----------------|--|--------|--|-------------------|--------|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Kebutuhan Dana | Ketera ngan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 3.315.332.713 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | 3.315.332.713,00 | |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | 1.550.000.000 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | | | 1.550.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | 7.614.862.950 | | Fasilitasi Tugas DPRD | | | | | 7.614.862.950,00 | |
| | J U M L A H | | | | | 51.864.660.505 | | J U M L A H | | | | | 52.001.926.284,00 | |

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (APABILA ADA)

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan **bukan oleh Sekretariat DPRD**. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 3.4

Usulan program dan kegiatan masyarakat

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume/Besaran | Catatan |
|----|----------------------|--------|----------------------|----------------|---------|
| | | | | | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | |

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 2 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat DPRD ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2024-2026

| No. | Nama Inovasi | Input Inovasi | | Proses Inovasi | Output Inovasi | Outcome Inovasi | Pelaksana/ Tahun |
|-----|---|---------------|----------|---|----------------|---|---------------------|
| | | SDM | Anggaran | | | | |
| | CONTOH | | | | | | |
| 1 | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. | Setwan | APBD | Penanganan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum | Produk Hukum | Meningkatnya jumlah dokumentasi dan informasi hukum | Setwan 2024 |

2.7 Penghargaan

Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 3 tahun ini tidak ada Penghargaan .

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat DPRD lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan Sekretariat DPRD yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029 adalah “Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Sekretariat DPRD .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh (Sekretariat DPRD)
3. Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
4. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2025 | TARGET KONDISI AKHIR 2026 |
|---|--|--|---|---------------|-------------------|---------------------------|
| Mewujudkan Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik | Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Administrasi Keuangan, Umum, dan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (ex BAU) | Angka | 100 | |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Fungsi DPRD Secara Optimal | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas | % | 90 | |
| | | | Persentase Kegiatan Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai Rencana | % | 95 | |
| | | | Persentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | | 100 | |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2025 | TARGET KONDISI AKHIR 2026 |
|--------|---------|---------|--|---------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD | | 100 | |

Sumber : Renstra Setwan Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2026

| RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 | | | (+ / -) |
|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| A | SEKRETARIAT DPRD | 52.001.926.284,00 | A | SEKRETARIAT DPRD | 52.001.926.284,00 | |
| | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 52.001.926.284,00 | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | 52.001.926.284,00 | |
| | SEKRETARIAT DPRD | 52.001.926.284,00 | | SEKRETARIAT DPRD | 52.001.926.284,00 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 35.141.569.621,00 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 35.141.569.621,00 | |
| | [Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] | 35.141.569.621,00 | | [Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian] | 35.141.569.621,00 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.579.999.110,00 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.579.999.110,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.579.999.110,00 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.579.999.110,00 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 545.130.500,00 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 545.130.500,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.000.000,00 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15.000.000,00 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.000.000,00 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 15.000.000,00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 15.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.000.000,00 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 395.130.500,00 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 395.130.500,00 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 25.000.000,00 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 25.000.000,00 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25.000.000,00 | |

| RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 | | | (+ / -) |
|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 831.336.400,00 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 831.336.400,00 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.760.000,00 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8.760.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.000.000,00 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 130.000.000,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 692.576.400,00 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 692.576.400,00 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 676.722.500,00 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 676.722.500,00 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 481.722.500,00 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 481.722.500,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 85.000.000,00 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 85.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000,00 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000,00 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.000.000,00 | |
| | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 29.963.381.111,00 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 29.963.381.111,00 | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 29.415.301.111,00 | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 29.415.301.111,00 | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 458.080.000,00 | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 458.080.000,00 | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 90.000.000,00 | | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 90.000.000,00 | |
| | Layanan Administrasi DPRD | 520.000.000,00 | | Layanan Administrasi DPRD | 520.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 100.000.000,00 | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 100.000.000,00 | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 420.000.000,00 | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 420.000.000,00 | |
| 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 16.860.356.663,00 | 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 16.860.356.663,00 | |
| | (Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang – undangan) : Persentase Jumlah Raperda yang dibahas Persentase Kegiatan DPRD yang diPublikasikan | 16.860.356.663,00 | | (Meningkatkan kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang – undangan) : Persentase Jumlah Raperda yang dibahas Persentase Kegiatan DPRD yang diPublikasikan | 16.860.356.663,00 | |

| RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 | | | (+ / -) |
|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| | Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana | | | Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD Persentase Kegiatan Pokok – Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana | | |
| | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 3.491.135.000,00 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 3.491.135.000,00 | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.850.000.000,00 | | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 1.850.000.000,00 | |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 525.000.000,00 | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | 525.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 1.116.135.000,00 | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 1.116.135.000,00 | |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 799.026.000,00 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 799.026.000,00 | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | 261.687.000,00 | | Pembahasan KUA dan PPAS | 261.687.000,00 | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 261.687.000,00 | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 261.687.000,00 | |
| | Pembahasan APBD | 137.826.000,00 | | Pembahasan APBD | 137.826.000,00 | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | 137.826.000,00 | | Pembahasan APBD Perubahan | 137.826.000,00 | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 90.000.000,00 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 90.000.000,00 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 22.000.000,00 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 22.000.000,00 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 22.000.000,00 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 22.000.000,00 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 22.000.000,00 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 22.000.000,00 | |
| | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 24.000.000,00 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 24.000.000,00 | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.315.332.713,00 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.315.332.713,00 | |
| | Pendalaman Tugas DPRD | 2.893.161.113,00 | | Pendalaman Tugas DPRD | 2.893.161.113,00 | |
| | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 222.171.600,00 | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 222.171.600,00 | |
| | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 200.000.000,00 | | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | 200.000.000,00 | |

| RANCANGAN RENJA Sekretariat DPRD TAHUN 2026 | | | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026 | | | (+ / -) |
|---|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|
| No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Pagu Indikatif | Pagu Indikatif |
| | (Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan) | 16.860.356.663,00 | | (Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan) | 16.860.356.663,00 | |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1.550.000.000,00 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1.550.000.000,00 | |
| | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 125.000.000,00 | | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 125.000.000,00 | |
| | Pelaksanaan Reses | 1.425.000.000,00 | | Pelaksanaan Reses | 1.425.000.000,00 | |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | 7.614.862.950,00 | | Fasilitasi Tugas DPRD | 7.614.862.950,00 | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 7.614.862.950,00 | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 7.614.862.950,00 | |
| | JUMLAH | 52.001.926.284,00 | | JUMLAH | 52.001.926.284,00 | |

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

Dari Tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2026 sebesar Rp 3.039.263.802
Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Rp. 3.039.263.802 (52.001.926.284 (2026) – 48.962.662.482 (2025)
dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Program dan Kegiatan di Sekretariat DPRD .

Tabel 3.8
Rencana Program dan Kegiatan SEKRETARIAT DPRD Kab. Temanggung
Tahun 2026

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2026 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | |
|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------|--|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiata n | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | 52.001.926.284 | | | | | 55.643.166.571 |
| 4 | UNSUR PENDUKUN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | 52.001.926.284 | | | | | 55.643.166.571 |
| 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | 52.001.926.284 | | | | | 55.643.166.571 |
| 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | 35.141.569.621 | | | | | 35.591.789.096 |
| | [Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan, adminitra umum dan kepegaw] | | Presentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunja perangkat daerah | | | | | | 35.141.569.621 | | | | | 35.591.789.096 |
| 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuang Perangkat Daerah | | | | | | | | 2.579.999.110 | | | | | 2.837.999.021 |
| 4.02.01.2.02 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah orang ya menerima gaji dan tunjangan ASN | | | | | | 2.579.999.110 | | | | | 2.837.999.021 |
| 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 545.130.500 | | | | | 674.959.300 |
| 4.02.01.2.06 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen instal Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | | | | | 5.000.000 | | | | | 10.000.000 |
| 4.02.01.2.06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | 15.000.000 | | | | | 20.000.000 |
| 4.02.01.2.06 5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | 15.000.000 | | | | | 20.000.000 |
| 4.02.01.2.06 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan | | | | | | 15.000.000 | | | | | 20.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|-------------|
| | | | perundang-undangan yang disediakan | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.068 | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | | 100.000.000 | | | | | 110.000.000 |
| 4.02.01.2.069 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD | | | | | | 395.130.500 | | | | | 494.959.300 |
| 4.02.01.2.07 | Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 25.000.000 | | | | | 50.000.000 |
| 4.02.01.2.076 | Penggandaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | | | | | | 25.000.000 | | | | | 50.000.000 |
| 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 831.336.400 | | | | | 861.529.464 |
| 4.02.01.2.081 | Penyediaan Jasa Survei Menyurat | | | | | | | | 8.760.000 | | | | | 10.000.000 |
| 4.02.01.2.082 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan | | | | | | 130.000.000 | | | | | 135.000.000 |
| 4.02.01.2.084 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | | | | | | 692.576.400 | | | | | 716.529.464 |
| 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 676.722.500 | | | | | 720.000.000 |
| 4.02.01.2.092 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | | | | | | 481.722.500 | | | | | 500.000.000 |
| 4.02.01.2.099 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | | 85.000.000 | | | | | 100.000.000 |
| 4.02.01.2.0910 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang | | | | | | 85.000.000 | | | | | 90.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|
| | | | dipelihara/direha si | | | | | | | | | | | |
| 4.02.01.2.09 1 | Pemeliharaan/Reha si Sarana dan Prasa Pendukung Gedung Kantor dan Banguna Lainnya | | Jumlah sarana d prasarana pendukung Ged kantor atau bangunan lainny yang dipelihara/direha si | | | | | | 25.000.000 | | | | | 30.000.000 |
| 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD | | | | | | | | 29.963.381.111 | | | | | 30.055.301.311 |
| 4.02.01.2.15 1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuang DPRD | | Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD | | | | | | 29.415.301.111 | | | | | 29.415.301.311 |
| 4.02.01.2.15 2 | Penyediaan Pakaiar Dinas dan Atribut DP | | Jumlah paket pakaian dinas da atribut DPRD ya disediakan | | | | | | 458.080.000 | | | | | 550.000.000 |
| 4.02.01.2.15 3 | Pelaksanaan Medica Check Up DPRD | | Jumlah orang ya mengikuti medic check up DPRD | | | | | | 90.000.000 | | | | | 90.000.000 |
| 4.02.01.2.16 | Layanan Adminstras DPRD | | | | | | | | 520.000.000 | | | | | 392.000.000 |
| 4.02.01.2.16 3 | Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | Jumlah laporan t fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD | | | | | | 100.000.000 | | | | | 110.000.000 |
| 4.02.01.2.16 4 | Penyediaan Kebutuh Rumah Tangga DPRD | | Jumlah paket kebutuhan ruma tangga DPRD ya disediakan | | | | | | 420.000.000 | | | | | 282.000.000 |
| 4.02.02 | PROGRAM DUKUN PELAKSANAAN TU DAN FUNGSI DPRD | | | | | | | | 16.860.356.663 | | | | | 20.051.377.475 |
| | [Meningkatnya Kual Persidangan dan Ka Peraturan Perundan undangan] | | Persentase juma rancangan perat daerah yang dib Persentase kegi DPRD yang dipulikasi Persentase kegi peningkatan kapasitas anggo DPRD Persentase kegi pokok-pokok pik DPRD yang dilaksanakan se rencana | | | | | | 16.860.356.663 | | | | | 20.051.377.475 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan DPRD | | | | | | | | 3.491.135.000 | | | | | 3.840.248.500 |
| 4.02.02.2.01 2 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah | | | | | | 1.850.000.000 | | | | | 2.035.000.000 |
| 4.02.02.2.01 3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | | Jumlah dokumen kajian perundang-undangan | | | | | | 525.000.000 | | | | | 577.500.000 |
| 4.02.02.2.01 4 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi | | | | | | 1.116.135.000 | | | | | 1.227.748.500 |
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | | | | | 799.026.000 | | | | | 799.026.000 |
| 4.02.02.2.02 1 | Pembahasan KUA dan PPAS | | Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | 261.687.000 | | | | | 261.687.000 |
| 4.02.02.2.02 2 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | 261.687.000 | | | | | 261.687.000 |
| 4.02.02.2.02 3 | Pembahasan APBD | | Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD | | | | | | 137.826.000 | | | | | 137.826.000 |
| 4.02.02.2.02 4 | Pembahasan APBD Perubahan | | Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan | | | | | | 137.826.000 | | | | | 137.826.000 |
| 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | 90.000.000 | | | | | 184.000.000 |
| 4.02.02.2.03 1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum | | Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang hukum | | | | | | 22.000.000 | | | | | 44.000.000 |
| 4.02.02.2.03 2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur | | | | | | 22.000.000 | | | | | 44.000.000 |
| 4.02.02.2.03 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat | | | | | | 22.000.000 | | | | | 44.000.000 |
| 4.02.02.2.03 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian | | | | | | 24.000.000 | | | | | 52.000.000 |
| 4.02.02.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | | | | | 3.315.332.713 | | | | | 3.349.171.600 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 4.02.02.2.042 | Pendalaman Tugas DPRD | | Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD | | | | | | 2.893.161.113 | | | | | 2.927.000.000 |
| 4.02.02.2.045 | Penyediaan Tenaga Fraksi | | Jumlah tenaga a fraksi | | | | | | 222.171.600 | | | | | 222.171.600 |
| 4.02.02.2.048 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | 200.000.000 | | | | | 200.000.000 |
| | [Meningkatnya Kual Penganggaran dan Pengawasan] | | Persentase lapo pembahasan kebijakan angga Persentase lapo pengawasan penyelenggaraa pemerintahan ol DPRD | | | | | | 16.860.356.663 | | | | | 20.051.377.475 |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspi Masyarakat | | | | | | | | 1.550.000.000 | | | | | 1.685.225.700 |
| 4.02.02.2.052 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | Jumlah dokumen pokok-pokok pik DPRD yang disu | | | | | | 125.000.000 | | | | | 125.000.000 |
| 4.02.02.2.053 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | 1.425.000.000 | | | | | 1.560.225.700 |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPR | | | | | | | | 7.614.862.950 | | | | | 10.193.705.675 |
| 4.02.02.2.081 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksan Tugas DPRD | | Jumlah dokumen hasil koordinasi konsultasi pelaksanaan tug DPRD | | | | | | 7.614.862.950 | | | | | 10.193.705.675 |
| JUMLAH | | | | | | | | | 52.001.926.284 | | | | | 55.643.166.271 |

Sumber Data : Hasil Cetak Renja Pada SIPD RI

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2026 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 80,04 %, yaitu realisasi belanja sebesar 42.552.063.766 dari APBD sebesar 53.495.825.817, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 39,02 %, yaitu dari jumlah realisasi sebesar 18.788.529.008 dari APBD sebesar 48.394.785.385 .

Dalam Renja Tahun Anggaran 2026 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 52.001.926.284 yang terdiri dari 2 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 31 Juli 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001